

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Legalitas kedudukan hukum pedagang uang elektronik tidak dapat ditentukan menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik maupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing. Syarat utama pedagang uang elektronik untuk melakukan kegiatan perdagangan uang elektronik , yaitu izin dari Bank Indonesia tidak dapat terpenuhi karena ada unsur asing dalam aktivitas perdagangan uang elektronik. Obyek perdagangan uang elektronik yang dilakukan oleh pedagang uang elektronik di Indonesia merupakan uang elektronik yang diterbitkan oleh subyek hukum asing, yaitu penerbit uang elektronik yang berasal dari luar Indonesia. Uang elektronik asing dan penerbit uang elektronik asing ini tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik maupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing.
2. Transaksi perdagangan uang elektronik yang dilakukan oleh pedagang uang elektronik tidak bisa didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik karena obyek yang diperdagangkan berbeda. Transaksi perdagangan uang elektronik diklasifikasikan sebagai transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor

82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pilihan forum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa jual-beli uang elektronik adalah menggunakan jalur non-litigasi karena jika menggunakan jalur litigasi akan menyulitkan hakim dalam menyusun keputusan.

B. Saran

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik harus diamandemen dengan penambahan pengertian uang elektronik asing sehingga perdagangan uang elektronik yang dilakukan oleh pedagang uang elektronik mendapatkan kepastian hukum.
2. Penegak hukum di Indonesia harus memahami konsep uang elektronik yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Kekosongan hukum yang terjadi dalam aktivitas perdagangan uang elektronik harus menjadi catatan penting dalam penyelesaian sengketa jual-beli uang elektronik sehingga dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa jual-beli uang elektronik.

Daftar Pustaka

Buku

- Bank for International Settlements, 1996, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money*, Basle.
- Edmon Makarim, 2007. *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Indonesia.
- Mario Giovani , 2012. *Internasional Monetary Law : Issues For The New Millenium*, Oxford University Press, United States
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Indonesia
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), *Supervising Nonbank E-Money Issuers*, United State, 2012
- Thomas J. Smedinghoff, 1999, *Online Law – The SPA’s Legal Guide to Doing Business on the Internet*, The Software Publishers Association, United States.

Website

- Digital Currency Exchanger – DCE**. Diakses dari <http://www.investopedia.com/> 7 September 2013
- Investor Daily, **Transaksi Menggunakan APMK** Diakses dari <http://www.investor.co.id/> Pada Tanggal 14-Juni-2014
- Kay Solomon. 2013. *Liberty Reserve Tutup: Tragedi Online Tahun Ini*. Diakses dari <http://teknologi.kompasiana.com/internet/2013/05/29/liberty-reserve-tutup-tragedi-online-tahun-ini-560409.html> 7 September 2013
- Penipuan jual balance paypal** <http://forum.detik.com/>, Diakses Pada Tanggal 16-Juni-2014
- PayPal User Agreement** Diakses dari <https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/useragreement-full> 7 Februari 2014
- Suaratrader. 2013. *FBI akan menutup Exchanger Indonesia*. Diakses dari <http://suaratrader.wordpress.com/2013/05/31/fbi-akan-menutup-exchanger-indonesia/> 7 September 2013

Kamus

- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (9th Edition)*, West. United States of America, Thomson business, 2004

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (LN Republik Indonesia Tahun 1847 No. 23)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (LN Republik Indonesia Tahun 2012 No. 189)

Peraturan Kebijakan

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. (LN Republik Indonesia Tahun 2009 No. 65 DASP)

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing (LN Republik Indonesia Tahun 2010 No. 146)

Surat Eradaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP 2009 Perihal Uang Elektronik